

**ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF THE GROWTH OF REGIONALLY-GENERATED FUNDS,
GENERALLY-ALLOCATED FUNDS, AND SPECIALLY-ALLOCATED FUNDS ON HUMAN
DEVELOPMENT IN PEKANBARU WITH CAPITAL EXPENDITURE GROWTH AS THE MODERATOR**

Helly Aroza Siregar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 Pekanbaru 28127

ABSTRACT

The aim of this study are to determine the effect of PAD Growth, DAU Growth and DAK Growth to the Human Development Index (HDI), and to investigate whether Capital Expenditure Growth to strengthen connections between PAD Growth DAU Growth and DAK Growth to the Human Development Index. This research was conducted in Pekanbaru City using secondary data along 2007 to 2015 obtained from the Budget Realization Report (LRA) Pekanbaru to collect data PAD, DAU, DAK and Capital Expenditure. While data of the Human Development Index (HDI) were obtained from the Central Statistics Agency Pekanbaru. Technical analysis of data using multiple linear regression analysis and Multiple Regression Analysis (MRA) to see the effect of moderation. The results showed that there are no influence effect of PAD Growth, DAU Growth and DAK Growth to IPM, while Capital Expenditure shall not be moderating variables for this study, because Capital Expenditure can not strengthen the link between PAD Growth, DAU Growth and DAK Growth to IPM. The implications of this study confirms that the implementation of Pekanbaru City budget that implemented by the Local Government of Pekanbaru became not dominant factor to improving human quality in this city.

Keywords: PAD Growth, DAU Growth and DAK Growth, HDI

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN DANA
ALOKASI UMUM DAN PERTUMBUHAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PEMBANGUNAN
MANUSIA DI KOTA PEKANBARU DENGAN PERTUMBUHAN BELANJA MODAL SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Belanja Modal dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan data sekunder tahun 2007 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru untuk mengumpulkan data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan Multiple Regression Analysis (MRA) untuk melihat efek moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM, sementara Belanja Modal tidak dapat dijadikan variabel pemoderasi karena adanya Belanja Modal tidak dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan APBD Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menjadi faktor yang tidak dominan dalam meningkatkan kualitas manusia di kota ini.

Kata Kunci: Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU, Pertumbuhan DAK, IPM

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembangunan dalam suatu negara karena sumber daya manusia merupakan modal dasar dan penggerak utama dari keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Semakin tinggi kapabilitas dasar sumber daya manusia yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

Menurut Setyowati & Suparwati (2012) keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf. Artinya, pembangunan yang berhasil akan berdampak pada pengurangan kemiskinan penduduk, penurunan tingkat pengangguran, pengurangan gizi buruk pada balita yang ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat dan peningkatan taraf pendidikan sehingga akan menanggulangi permasalahan buta huruf.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standard pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli.

Indikator IPM yaitu angka harapan hidup dan kemampuan daya beli sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan penduduk. Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2015) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2015 sebesar 531,39 ribu jiwa (8,42 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang berjumlah 499,89 ribu jiwa (8,12 persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 31,50 ribu jiwa.

Masalah lain yang sangat berhubungan dengan IPM adalah pendidikan. Angka partisipasi sekolah di Kota Pekanbaru usia 16-18 tahun pada tahun 2014 adalah 76,04%. (BPS, 2015: 99). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 23,96%.

Melihat berbagai permasalahan di atas maka pemerintah wajib melakukan perbaikan kualitas manusia di kota ini. Dalam melaksanakan perbaikan tersebut maka perlu dibiayai oleh APBD Kota Pekanbaru. Sumber dana yang dapat digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber-sumber keuangan daerah tersebut kemudian harus dialokasikan untuk pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan manusia. Pengalokasian tersebut dibelanjakan melalui Belanja Modal (BM).

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programme) dalam laporannya “Global Human Development Report” memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (Human Development)” sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut.

Menurut Harahap (2010) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Sebagaimana dikutip dari laporan UNDP atau United Nations Development Program (1995:118), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut: (a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. (b) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata. (c) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal. (d) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. (e) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara ditinjau dari aspek harapan hidup, pendidikan dan standar hidup penduduk di suatu negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Adapun kategori tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kategori “sangat

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

tinggi” : $IPM \geq 80$, (b) kategori “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$, (c) kategori “sedang” : $60 \leq IPM < 70$, dan (d) kategori “rendah” : $IPM < 60$.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka (18) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah kelompok Pendapatan Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas: 1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak. 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata. 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah. 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah yang bersasal dari daerah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari kekayaan daerah yang dikelola oleh BUMD dan berbagai macam bentuk penerimaan daerah lainnya dalam bentuk lain-lain PAD yang Sah.

Pertumbuhan PAD sangat penting untuk pembangunan di suatu daerah. Karena pertumbuhan PAD yang positif setiap periode menunjukkan daerah yang memiliki kemampuan untuk mendanai pembangunan di daerahnya. Adapun rumus pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1})}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100\%, \text{ dimana}$$

PAD_n = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan
 PAD_{n-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Menurut Undang-undang tersebut, porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009): (1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas. (3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (4) Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan DAU yang disalurkan Pemerintah Pusat pada Daerah berguna untuk menunjang pembiayaan pembangunan di suatu daerah. Adapun rumus pertumbuhan DAU adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan DAU} = \frac{(\text{DAU}_n - \text{DAU}_{n-1})}{\text{DAU}_{n-1}} \times 100\%, \text{ dimana}$$

DAU_n = Dana Alokasi Umum tahun berjalan
 DAU_{n-1} = Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sedangkan pengertian DAK menurut PP 55/2005, Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012:88).

DAK yang disalurkan Pemerintah Pusat pada Daerah berguna untuk menunjang pembiayaan pembangunan di suatu daerah pada bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas nasional. Dengan pertumbuhan DAK maka bidang-bidang khusus yang didanai dengan adanya DAK akan dapat terlaksana di daerah. Adapun rumus pertumbuhan DAK adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan DAK} = \frac{(\text{DAKn} - \text{DAKn-1})}{\text{DAKn-1}} \times 100\%, \text{ dimana}$$

DAKn = Dana Alokasi Khusus tahun berjalan

DAKn-1 = Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya

Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat juga memiliki manfaat dari pembangunan daerah.

Pada Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pertumbuhan Belanja Modal sangat penting karena Belanja Modal yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa alokasi APBD untuk melakukan pembangunan fisik untuk kepentingan publik semakin baik.

Untuk menghitung pertumbuhan Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan BM} = \frac{(\text{BMn} - \text{BMn-1})}{\text{BMn-1}} \times 100\%, \text{ dimana}$$

BMn = Belanja Modal tahun berjalan

BMn-1 = Belanja Modal tahun sebelumnya

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM (Putra dan Ulupui, 2015). Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Setyowati & Suparwati (2012) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).

Novarianti (2016) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dengan Analisis jalur ditemukan bahwa Belanja modal memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Vegirawati (2012) menyimpulkan bahwa tidak ada efek signifikan dari Belanja Langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal itu sendiri merupakan bagian dari Belanja Langsung, sehingga dapat diketahui bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia. Sementara Harahap (2011) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan IPM serta Hubungan Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah yang bersasal dari daerah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari kekayaan daerah yang dikelola oleh BUMD dan berbagai macam bentuk penerimaan daerah lainnya dalam bentuk lain-lain PAD yang Sah. PAD yang besar dan terus mengalami peningkatan dapat menjadi indikasi bahwa daerah sudah dapat mandiri dalam mendanai pembangunan di daerah dimana PAD tersebut akan dialokasikan dalam bentuk Belanja Daerah.

Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan yang ada di daerah. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal dikhususkan untuk menjadi sumber dana bagi pembangunan infrastruktur yang ada di daerah. Dengan alokasi Belanja Modal yang semakin besar dan pelaksana kegiatan yang berkualitas maka pengalokasian Belanja Modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas manusia yang ada di daerah. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Belanja Modal akan memberikan fasilitas publik yang lebih baik pada masyarakat. Fasilitas publik tersebut dapat berupa jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sarana prasarana publik lainnya. Dengan fasilitas publik yang semakin baik maka dukungan untuk meningkatkan pembangunan manusia akan meningkat. Pada akhirnya hal ini akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah.

Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga bahwa PAD berpengaruh terhadap IPM

H₂: Diduga bahwa interaksi antara PAD dan Belanja Modal, berpengaruh terhadap IPM

Hubungan Dana Alokasi Umum dan IPM serta Hubungan Interaksi Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang mana dananya bersumber dari APBN. Tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam upaya pelaksanaan Desentralisasi. Dengan adanya DAU maka ketimpangan kemampuan keuangan yang ada di daerah akan dapat di atasi karena pada dasarnya kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda.

Dengan adanya DAU yang dialokasikan untuk masing-masing daerah maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan DAU sebagai sumber dana pembangunan yang di salurkan melalui Belanja Modal. Dengan dana yang cukup besar pada anggaran Belanja Modal maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang publik sehingga fasilitas publik akan semakin baik. Dengan fasilitas publik yang semakin meningkat maka masyarakat di daerah diharapkan akan semakin berkembang baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manusia yang diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diduga bahwa DAU berpengaruh terhadap IPM

H₄: Diduga bahwa interaksi antara DAU dan Belanja Modal, berpengaruh terhadap IPM

Hubungan Interaksi Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam mempengaruhi Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu bentuk dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana dana ini dialokasikan Pemerintah Pusat dengan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk diberikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah yang memperoleh DAK merupakan daerah yang memiliki kebutuhan khusus untuk pembangunan dan belum mandiri secara keuangan untuk membiayai sendiri kebutuhan khusus tersebut dengan mengandalkan penerimaan dari daerah sendiri. Pemberian DAK untuk daerah disesuaikan dengan kemampuan APBD di daerah tersebut dengan melihat karakteristik daerah yang akan menerima DAK.

Dengan adanya DAK maka daerah yang membutuhkan dana untuk pembangunan akan dapat menggunakan dana tersebut. Penggunaan DAK dapat diperuntukkan bagi kebutuhan daerah yang digunakan dalam bentuk Belanja Modal. Salah satu bentuk penggunaan DAK adalah untuk mendanai sarana dan prasarana daerah tertinggal. Penggunaan DAK dalam hal ini dapat disalurkan dalam bentuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan dan jembatan, pembangunan perumahan untuk rakyat dan lain sebagainya. Dengan adanya DAK yang disalurkan dalam bentuk Belanja Modal maka kualitas hidup masyarakat akan semakin baik. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas manusia yang diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

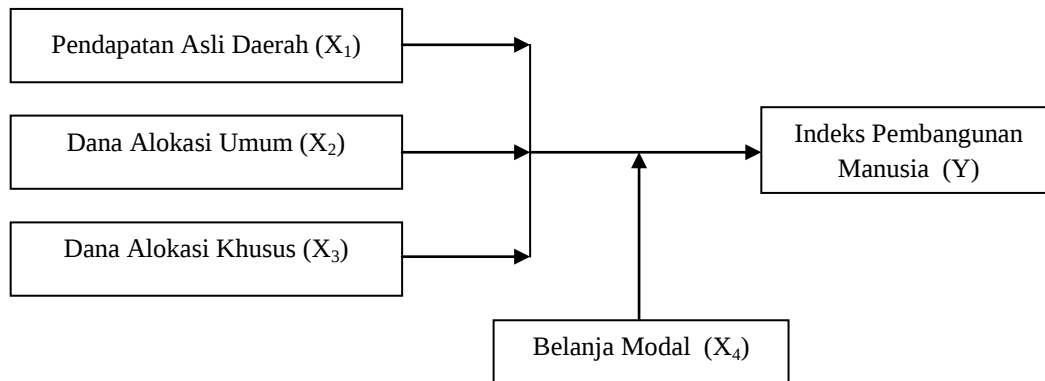
Berdasarkan hal ini maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₅: Diduga bahwa DAK berpengaruh terhadap IPM

H6: Diduga bahwa interaksi antara DAK dan Belanja Modal, berpengaruh terhadap IPM

Kerangka Penelitian

Adapun kerangka penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru dan data Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru periode 2007-2015. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Kota Pekanbaru yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dan data IPM yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

Untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM dan juga pengaruh interaksi Belanja Modal sebagai variabel moderasi dengan variabel-variabel independen seperti PAD, DAU dan DAK terhadap IPM digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda, MRA dan pengujian hipotesis.

Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan dua tahap. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- X_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 : Dana Alokasi Umum (DAU)
- X_3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e : error

Yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh interaksi variabel moderasi dan variabel independen terhadap variabel dependen, analisis regresi yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis (MRA) dengan formula sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 |X_1 \cdot X_4| + \beta_6 |X_2 \cdot X_4| + \beta_7 |X_3 \cdot X_4| + e$$

Dimana:

- Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$: Koefisien Regresi
- X_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 : Dana Alokasi Umum (DAU)
- X_3 : Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X_4 : Belanja Modal
- $X_1 X_4$: Interaksi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal
- $X_2 X_4$: Interaksi antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Statistik Data Penelitian

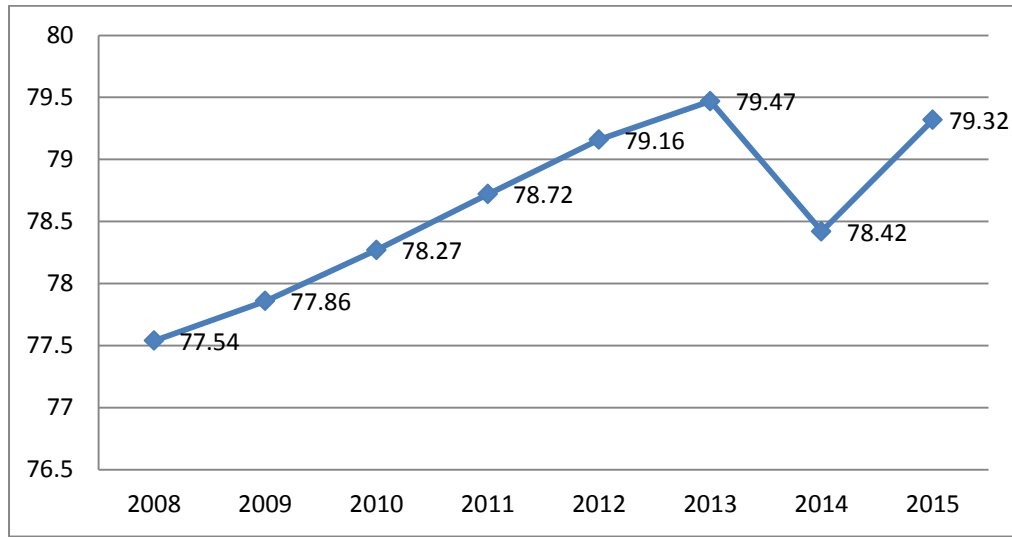
Deskriptif statistik merupakan hasil olahan data untuk melihat nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari data penelitian yang diolah tanpa mengambil suatu keputusan. Untuk melihat deskriptif statistik pada penelitian ini dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 1. Deskriptif Statistik

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	8	1.93	77.54	79.47	78.59	.69
Pertumbuhan PAD	8	47.57	-9.64	37.93	16.24	13.41
Pertumbuhan DAU	8	69.28	-42.66	26.62	-8.20	20.15
Pertumbuhan DAK	8	391.45	-33.94	357.51	38.79	132.15
Pertumbuhan BM	8	122.02	-39.33	82.69	-5.60	38.24
Valid N (listwise)	8					

Sumber: Hasil Olahan Data

Tabel di atas menunjukkan deskriptif statistik data penelitian dimana rata-rata IPM dalam 8 (delapan) tahun terakhir adalah 78, 59. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata IPM kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 berada dalam kategori “tinggi”. Nilai minimum IPM Kota Pekanbaru menunjukkan angka 77,54 dan nilai maksimum adalah 79,47, dengan *range* 1,93 dan standar deviasi 0,69. Hal ini menunjukkan bahwa IPM kota Pekanbaru berada pada kategori yang sama dan memiliki data yang tidak beragam. Untuk melihat kondisi IPM Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 dapat dilihat dari gambar berikut:



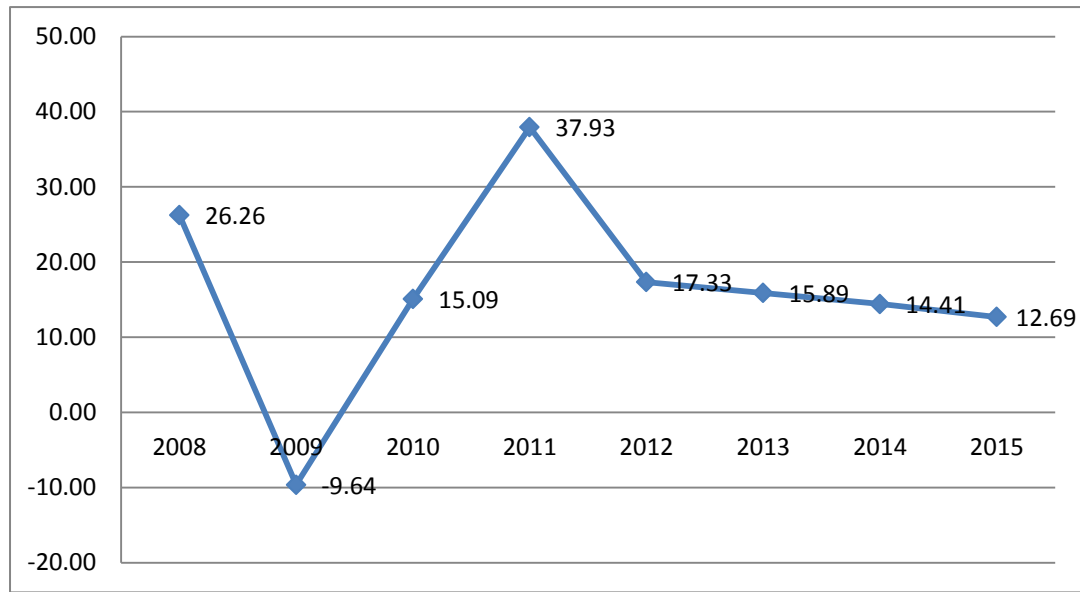
Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Gambar 2. IPM Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015

Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa IPM Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2013, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,05 jika dibandingkan dengan tahun 2013, namun pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan. IPM tertinggi berada pada tahun 2013 dan IPM terendah berada pada tahun 2008.

Secara rata-rata Pertumbuhan PAD Kota Pekanbaru dalam 8 (delapan) tahun terakhir adalah 16,24%. Dimana nilai minimum dari Pertumbuhan PAD adalah -9,64. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan Pertumbuhan PAD sebesar 9,64%. Nilai maksimum Pertumbuhan PAD adalah 37,93, dimana angka ini

menunjukkan Pertumbuhan PAD yang meningkat sebesar 37,93%. Untuk melihat Pertumbuhan PAD di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:

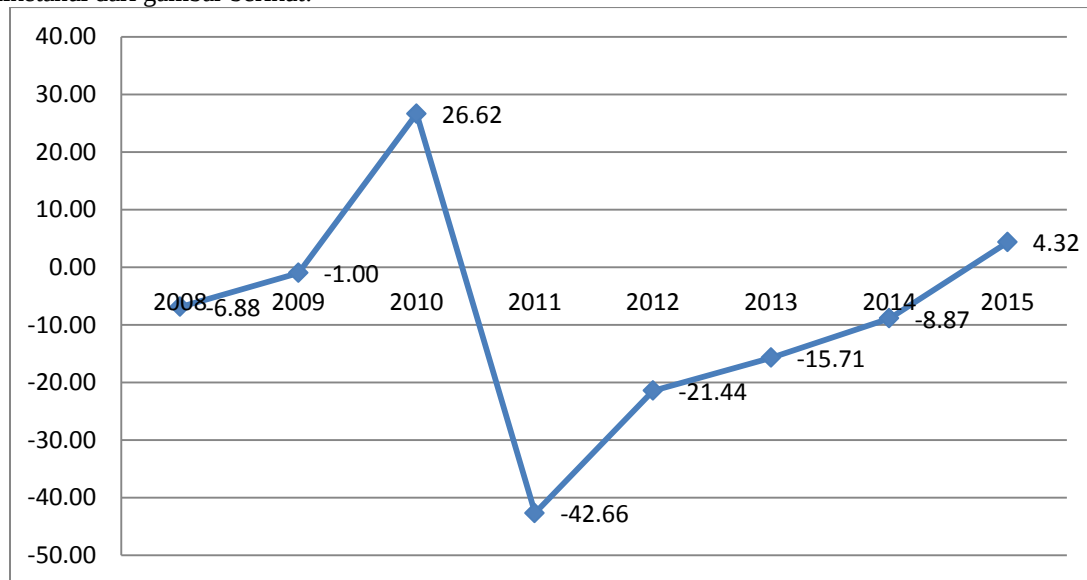


Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Gambar 3. Pertumbuhan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan Pertumbuhan PAD pada tahun 2009 dengan persentase penurunan sebesar 35,91% jika dibandingkan dengan tahun 2008, angka ini cukup signifikan. Namun demikian pada tahun 2010 Pertumbuhan PAD kembali naik sebesar 24,73% jika dibandingkan dengan tahun 2009. Angka ini kembali naik pada tahun 2011, namun secara berkala mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 meskipun dengan persentase yang cukup kecil.

Secara rata-rata Pertumbuhan DAU dalam 8 (delapan) tahun terkahir adalah negatif 8,20. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Pertumbuhan DAU berada pada angka negatif atau mengalami penurunan. Untuk melihat bagaimana Pertumbuhan DAU di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015 dapat diketahui dari gambar berikut:



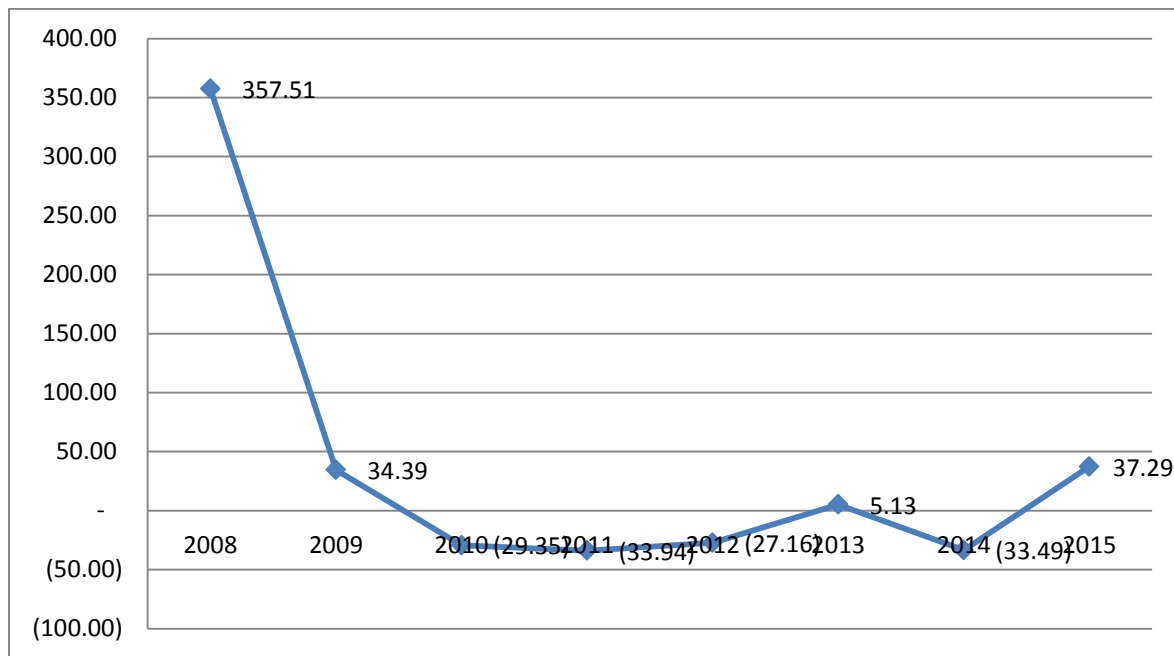
Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Gambar 4. Pertumbuhan DAU Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan DAU di Kota Pekanbaru pada tahun secara rata-rata berada pada kondisi yang menurun, hal ini dapat diketahui dari angka Pertumbuhan DAU yang berada pada angka negatif pada tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Sementara pada tahun 2010 dan 2015 Pertumbuhan DAU berada pada angka positif. Pertumbuhan DAU meningkat cukup tinggi pada tahun 2010 namun pada tahun 2011 menurun cukup drastis. Kondisi Pertumbuhan DAU yang dominan berada di angka negatif dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah Pendapatan Negara dalam APBN yang tidak dapat direalisasikan sehingga berakibat pada penurunan alokasi DAU untuk disalurkan di daerah. Faktor lainnya dapat disebabkan karena Pemerintah Daerah yang tidak mampu menggunakan DAU di daerah sehingga DAU tidak terserap seluruhnya.

Pertumbuhan DAK Kota Pekanbaru selama periode 2008 sampai dengan 2015 sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai minimum Pertumbuhan DAK sebesar negatif 33,94 sementara nilai maksimum Pertumbuhan DAK adalah 357,51 dengan *range* mencapai 391,45. Untuk melihat bagaimana Pertumbuhan DAK di Kota Pekanbaru dapat diketahui dari gambar berikut

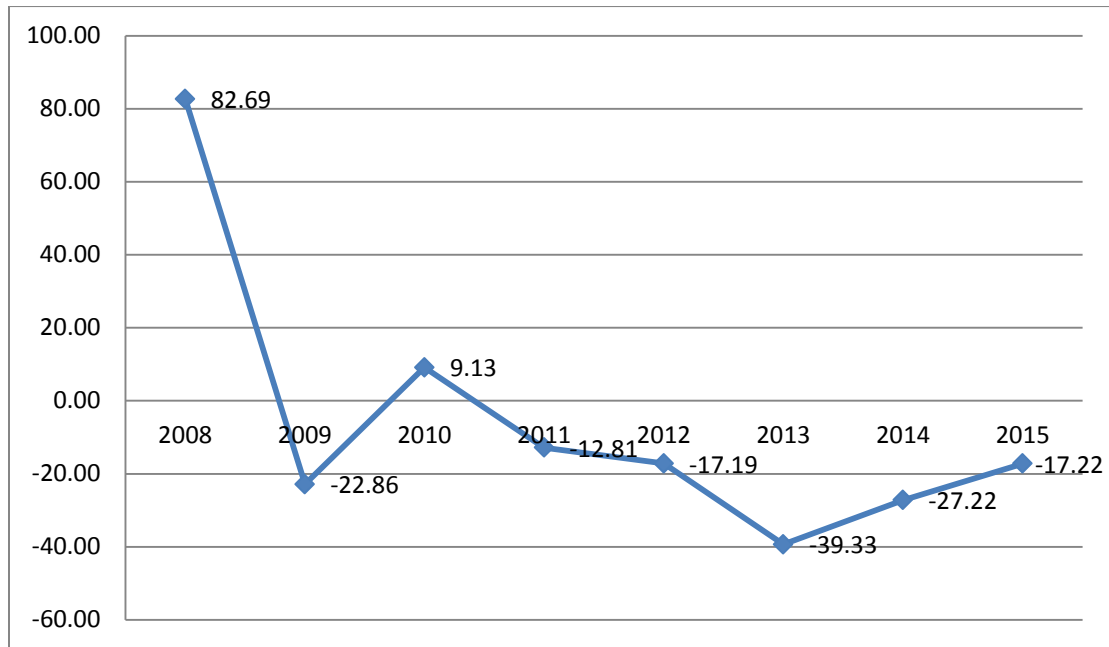


Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Gambar 5. Pertumbuhan DAK Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015

Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa terjadi Pertumbuhan DAK yang sangat signifikan pada tahun 2008 hingga mencapai angka 357,51%. Namun demikian alokasi DAK untuk Kota Pekanbaru menurun pada tahun 2009 namun tetap pada angka yang positif. Kemudian pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014 Pertumbuhan DAK mengalami pertumbuhan negatif. Sementara pada tahun 2013 dan 2015 kembali positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Belanja Modal secara rata-rata berada pada angka pertumbuhan yang negatif pada periode 2008 sampai dengan 2015. Angka minimum Pertumbuhan Belanja Modal adalah negatif 39,33 sedangkan angka maksimum berada pada persentase 82,69%. Untuk melihat bagaimana Pertumbuhan Belanja Modal di Kota Pekanbaru dalam 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Gambar 6. Pertumbuhan Belanja Modal Kota Pekanbaru Tahun 2008-2015

Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan Belanja Modal berada pada angka negatif pada tahun 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, sementara pada tahun 2008 berada pada angka pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai angka 82,69%. Namun kembali menurun cukup jauh pada tahun 2009 dengan persentase penurunan mencapai 105,55%.

Penurunan Pertumbuhan Belanja Modal menunjukkan bahwa alokasi APBD yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembangunan mengalami alokasi dana yang menurun. Pada dasarnya hal ini berdampak tidak baik untuk pembangunan di daerah karena alokasi dana untuk pembangunan idealnya harus meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Setelah melakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik maka model regresi linear berganda sudah dapat dilakukan pengujian. Hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	78.196	1.025		76.268	.000
	Pertumbuhan PAD	.350	.504	.341	.693	.526
	Pertumbuhan DAU	.019	.616	.020	.030	.977
	Pertumbuhan DAK	-.054	.365	-.097	-.148	.890

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Berdasarkan nilai koefisien yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibuat rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 78,196 + 0,350 X_1 + 0,019 X_2 - 0,054 X_3$$

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

Adapun penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Konstanta bernilai positif sebesar 78,196 artinya jika variabel independen yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU, dan Pertumbuhan DAK adalah konstan, maka IPM sudah terbentuk sebesar 78,196. (2) Koefisien regresi pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap IPM adalah positif 0,350. Artinya apabila Pertumbuhan PAD ditingkatkan 100% maka akan meningkatkan IPM sebesar 35%. (3) Koefisien regresi pengaruh Pertumbuhan DAU terhadap IPM adalah positif sebesar 0,019. Artinya, apabila Pertumbuhan DAU ditingkatkan 100% maka akan meningkatkan IPM sebesar 1,9%. (4) Koefisien regresi pengaruh Pertumbuhan DAK terhadap IPM adalah negatif sebesar 0,054. Artinya, apabila Pertumbuhan DAK ditingkatkan 100% maka akan menurunkan IPM sebesar 5,4%.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.376 ^a	.141	-.503	.85635

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan DAK, Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka diketahui bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0,141 atau 14,1%. Artinya variabel Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU, dan Pertumbuhan DAK hanya dapat menjelaskan variasi variabel IPM sebesar 14,1%, sedangkan sisanya yaitu 85,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini atau untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM. Diterima atau tidaknya hipotesis ditentukan dengan syarat sebagai berikut: (a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja. (b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka insentif berpengaruh terhadap kinerja.

Nilai t_{tabel} diperoleh dengan cara menghitung tingkat kepercayaan dibagi 2; jumlah responden dikurangi jumlah variabel bebas kemudian dikurangi 1, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$$

$$t_{tabel} = (0,05/2; 8-3-1) = (0,025; 4) = 2,776$$

Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel Independen	t tabel	t hitung	Sig.	Keputusan	Hasil
Pertumbuhan PAD (X_1)	2,776	0,693	0,526	H_a ditolak	Tidak berpengaruh
Pertumbuhan DAU (X_2)	2,776	0,030	0,977	H_a ditolak	Tidak berpengaruh
Pertumbuhan DAK (X_3)	2,776	-0,148	0,890	H_a ditolak	Tidak berpengaruh

Sumber: Hasil Olahan Data (2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM. Pertumbuhan PAD yang pada kenyataannya tidak mempengaruhi IPM dapat disebabkan karena fluktuasi PAD yang beragam. Pada tahun 2009 PAD Kota Pekanbaru bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka pertumbuhan yang negatif. Sementara pada tahun yang sama IPM Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Hal ini dapat membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Pertumbuhan PAD tersebut dalam meningkatkan IPM di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan DAU tidak berpengaruh terhadap IPM dapat diinterpretasikan dengan grafik Pertumbuhan DAU (Gambar 3) yang dengan jelas menunjukkan bahwa Pertumbuhan

DAU di Kota Pekanbaru pada tahun secara rata-rata berada pada kondisi yang menurun, bahkan mayoritas berada pada angka pertumbuhan yang negatif. Sementara IPM di Kota Pekanbaru dalam periode yang sama cenderung mengalami peningkatan. Idealnya Pertumbuhan DAU dapat mendorong pembangunan dan peningkatan fasilitas publik yang digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas manusia di suatu daerah. Namun kondisi Pertumbuhan DAU yang negatif menunjukkan bahwa terjadi pengurangan dana pembangunan yang bersumber dari DAU tersebut. Sejalan dengan kondisi penurunan Pertumbuhan DAU tersebut, Pertumbuhan DAK di Kota Pekanbaru juga menunjukkan keadaan yang sama dimana Pertumbuhan DAK cenderung menurun. Hal ini dapat berdampak pada tidak adanya hubungan antara Pertumbuhan DAU ataupun Pertumbuhan DAK dan IPM di Kota Pekanbaru.

Hasil Uji Multiple Regression Analysis (MRA)

Uji Multiple Regression Analysis (MRA) digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini atau untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh moderasi dari variabel Pertumbuhan Belanja Modal untuk memperkuat hubungan antara variabel independen yaitu Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK dalam mempengaruhi IPM. Adapun hasil uji MRA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji MRA.

Keterangan	t tabel	t hitung	Sig.	Keputusan	Hasil
Interaksi Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal (X_1X_4)	2,020	-0,871	0,433	H_a ditolak	Tidak dapat memoderasi
Interaksi Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan Belanja Modal (X_2X_4)	2,020	0,349	0,760	H_a ditolak	Tidak dapat memoderasi
Interaksi Pertumbuhan DAK dan Pertumbuhan Belanja Modal (X_3X_4)	2,020	-0,307	0,788	H_a ditolak	Tidak dapat memoderasi

Sumber: Hasil Olahan Data pada Lampiran 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak dapat memoderasi hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK dengan IPM di Kota Pekanbaru dalam 8 (delapan) tahun terakhir atau tahun 2008 sampai dengan 2015. Atau dengan kata lain interaksi antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK dengan Belanja Modal tidak dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK dengan IPM.

Idealnya Pertumbuhan Belanja Modal dapat menjadi faktor penting dalam meninjau peningkatan pembangunan di suatu daerah, karena Pertumbuhan Belanja Modal yang positif dapat menggambarkan alokasi dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan fasilitas publik semakin bertambah. Pada penelitian ini Pertumbuhan Belanja Modal pada kenyataannya cenderung menurun, sebab dari 8 (delapan) tahun data penelitian, 6 (enam) tahun diantaranya Pertumbuhan Belanja Modal berada pada angka negatif. Sementara pertumbuhan IPM di Kota Pekanbaru cenderung meningkat. Hal ini dapat menjelaskan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyaluran PAD, DAU dan DAK melalui Belanja Modal yang digunakan untuk pembanguana pada kenyataannya tidak dapat meningkatkan IPM di Kota Pekanbaru.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena Pertumbuhan PAD yang tidak stabil dan turun cukup jauh sementara IPM cenderung meningkat. (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan DAU tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena Pertumbuhan DAU secara rata-rata adalah negatif sehingga tidak memberikan dampak pada IPM yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena fluktuasi Pertumbuhan DAK yang naik dan turun, namun cenderung berada pada pertumbuhan yang negatif. Oleh sebab itu, Pertumbuhan DAK tidak memberikan dampak pada IPM yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. (4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi Belanja Modal dan Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU, Pertumbuhan DAK tidak dapat mempengaruhi IPM di Kota Pekanbaru pada tahun 2008 sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena PAD, DAU dan DAK yang disalurkan melalui Belanja Modal pada umumnya menurun sementara IPM dominan pada peningkatan.

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru dengan Pertumbuhan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi (Helly Aroza Siregar)

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat menyalurkan PAD, DAU dan DAK dengan lebih optimal untuk pembangunan di Kota Pekanbaru. (3) Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat menaikkan proporsi Belanja Modal dan merealisasikannya dengan optimal agar pembangunan di daerah dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 2015. *Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2015*. Pekanbaru. BPS.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Riva Ubar. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 11 No 1 /Maret 2011: hal. 47-58.
- Novarianti, Nina. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemediasi Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia 2010-2013*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putra, Putu Gde Mahendra dan Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015) : 863-877.
- Setyowati, Lilis & Suparwati, Yohana Kus. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Interveing*. Jurnal Prestasi Volume 9 Nomor 1. Juni 2012. Hal. 113-133.
- Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2010. *Regional : Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*. Medan : USU Press.
- Subekan, Hartono. 2012. *Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan*. Malang: Alta Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Vegirawati, Titin. *Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan)*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Vol.2 No.1 Januari 2012: hal. 65-74.